

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Uang tunai atau yang biasa disebut dengan kas merupakan komponen penting dalam melaksanakan suatu kegiatan. Hampir semua entitas baik bisnis maupun pemerintahan selalu menggunakan kas sebagai alat pembayaran yang sah dalam pelaksanaan kegiatan. Maka dari itu kas memiliki peran sentral dalam menjaga kelangsungan sebuah aktivitas.

Peranan akuntansi sebagai alat bantu komunikasi informasi mengenai transaksi keuangan menjadi besar karena perkembangan perekonomian yang sangat pesat. Masalah yang dihadapi pemimpin dalam menjalankan sebuah instansi baik swasta maupun pemerintahan menjadi kompleks dan sulit untuk dikerjakan sendiri. Salah satu contoh masalah yang sering dihadapi instansi pemerintahan adalah cara pengelolaan kas yang aman, karena kas merupakan aktiva yang paling likuid, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan.

Berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang pengelolaan uang negara/daerah, kas daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh gubernur/bupati/walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Oleh karena itu pengelolaan keuangan daerah telah diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB). Pertanggungjawaban laporan keuangan daerah harus disiapkan oleh Pemerintah Daerah hanya berupa Laporan Perhitungan Anggaran dan Nota Perhitungan dan sistem yang digunakan untuk menghasilkan laporan tersebut adalah MAKUDA (Manual Administrasi Keuangan Daerah).

Laporan pertanggungjawaban keuangan yang harus dibuat oleh Kepala Daerah adalah Laporan Perhitungan Anggaran, Nota Perhitungan, Laporan Arus Kas dan Neraca Daerah. Adapun prosedur akuntansi yang diterapkan sesuai ketentuan Pasal 233 Permendagri 13/2006 yaitu: Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas, Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas, Prosedur Akuntansi Aset Tetap dan Prosedur Akuntansi Selain Kas.

Pembangunan kas merupakan komponen sumber daya yang sangat penting dalam melaksanakan program pembangunan daerah yang telah direncanakan oleh pemerintah. Kas merupakan bentuk aktiva paling likuid, yang bisa dipergunakan segera untuk memenuhi kewajiban finansial perusahaan. perubahan kas dipengaruhi oleh dua aktivitas, yaitu: penerimaan dan pengeluaran kas.

Pada akuntansi terdapat transaksi penerimaan kas dan transaksi pengeluaran kas. Penerimaan kas merupakan kas yang berasal dari semua aktifitas penerimaan barang dan jasa akan menjadi pendapatan, sedangkan pengeluaran kas merupakan kas yang dikeluarkan untuk melaksanakan aktifitas operasional seperti pembelian persediaan, pembelian peralatan kantor, pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran listrik, air dan telpon yang akan menjadi biaya atau beban.

Instansi Pemerintah yaitu pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat, kas bersumber dari APBD dari Pemerintah Pusat dimana anggaran ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat terdapat dua Bendahara yang mengelola anggaran dari pemerintah yaitu Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. Bendahara penerima bertugas menerima semua kas yang masuk sedangkan bendahara

pengeluaran bertugas dalam melakukan pembayaran kas rutin seperti pembelanjaan peralatan kantor, pembayaran tunjangan gaji pegawai, pembelian persediaan, dan sebagainya.

Kas merupakan aset lancar yang paling likuid dan hampir seluruh transaksi dipengaruhi oleh kas, maka sangat mudah terjadi penyelewengan terhadap kas. Oleh karena itu pengendalian internal terhadap kas diperlukan untuk melindungi penerimaan dan pengeluaran kas dan menetapkan tanggung jawab secara yang jelas dan kepada tiap orang yang memiliki tanggung jawab untuk tugas yang diberikan.

Pengendalian internal adalah teknik pengawasan dari seluruh kegiatan operasional instansi/perusahaan yang digunakan untuk mencegah terjadinya kecurangan dan kesalahan serta melindungi aset suatu instansi/perusahaan terutama kas yang paling likuid.

Sistem pengendalian internal sendiri ada dalam Peraturan Pemerintah Republik No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tujuan dari pengendalian internal terhadap kas adalah agar instansi/perusahaan dapat menggunakan kas secara efektif serta melindungi kas dari penyelewengan, pencurian dan manipulasi.

Setiap penerimaan, pengeluaran dan pengelolaan kas harus dilakukan dengan baik, artinya jangan sampai instansi kekurangan kas untuk melakukan berbagai keperluan pengeluaran perusahaan. kekurangan kas untuk memenuhi kewajiban akan berakibat hilangnya kepercayaan pihak luar terhadap instansi. Demikian pula jika kelebihan kas harus mampu mengelola dengan baik. Penerimaan dan pengeluaran kas harus desuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Kas selalu dijadikan objek utama yang salah gunakan sehingga memungkinkan bahwa pengelolaan dalam instansi pemerintah sangat kompleks dan tidak jarang terjadi

penyalahgunaan kas. Untuk itu, diperlukannya pengendalian internal. Pengendalian internal biasanya mutak diperlukan seiring dengan tumbuh dan berkembangnya dalam suatu instansi.

Kas daerah adalah aset lancar yang sensitif terhadap kemungkinan penyimpangan. Kas merupakan salah satu aktiva yang mudah diubah menjadi aset yang lain; sangat mudah disembunyikan dan dipindahkan. Oleh karena itu, diperlukan prosedur yang memadai untuk melindungi pengeluaran kas sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Semakin baik prosedur pengeluaran kas suatu instansi pemerintah, maka semakin dapat dipercaya besarnya akun kas yang dilaporkan pada laporan keuangan tersebut. Dengan adanya prosedur pengeluaran kas maka kemungkinan tingkat penyelewengan, pencurian dan penggelapan kas akan mudah ditelusuri.

Dengan adanya prosedur pengendalian internal kas yang baik, diharapkan dapat mengawasi penerimaan, pengeluaran serta pengelolaan kas daerah yang dapat dilakukan secara tepat, aman, terkendali dan transparan tanpa adanya kecurangan yang dapat terjadi. Keamanan kas daerah dalam pengelolaan keuangan sudah sudah semestinya menjadi tanggung jawab pemerintahan untuk menggunakan kas daerah sebaik-baiknya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis mencoba mempelajari proses pengendalian internal kas sebagai pengimplikasian teori yang telah didapatkan di perkuliahan yang dituangkan dalam sebuah laporan magang dengan mengambil judul: **“PROSEDUR PENGENDALIAN INTERNAL KAS PADA BIRO BINA MENTAL DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRETARIAT DAERAH KANTOR GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya yaitu:

1. Apakah pengendalian internal kas terhadap pengeluaran kas pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah telah sesuai dengan prosedur yang berlaku?
2. Bagaimana pengimplementasian prosedur pengendalian kas pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat untuk mencegah penyelewengan, pencurian dan penggelapan kas?

1.3 Tujuan Kegiatan Magang

Ada pun tujuan dari penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan/Magang pada Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat:

1. Memenuhi mata kuliah wajib Magang bagi mahasiswa Program Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Andalas dan melengkapi SKS sesuai dengan yang diterapkan sebagai syarat kelulusan.
2. Untuk mempraktekan ilmu teori yang didapat dari perkuliahan dan mengaplikasikan ilmu yang penulis peroleh dibangku kuliah dengan magang yang sesungguhnya di Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.
3. Untuk menganalisis pengendalian kas di Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

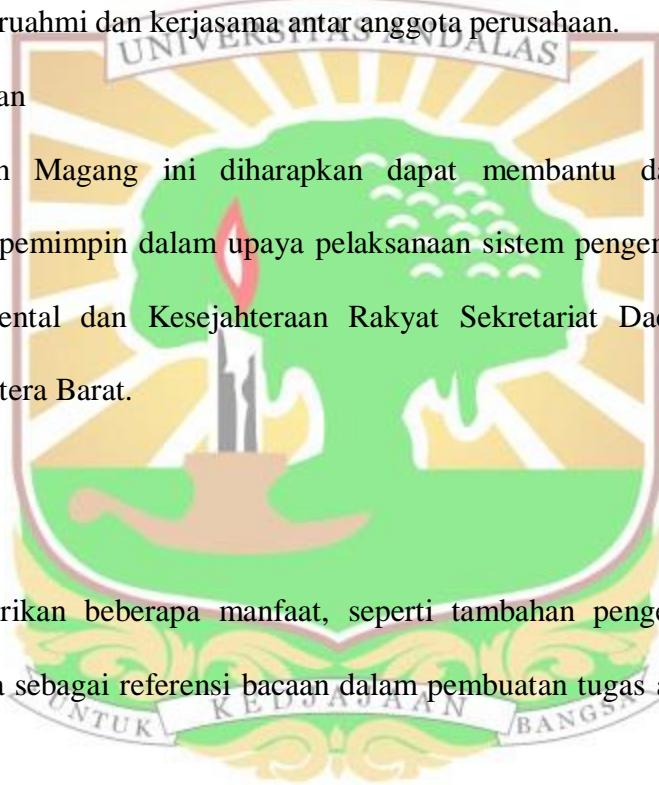
1.4 Manfaat Kegiatan Magang

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan dan sebagai penerapan teori-teori yang telah diperoleh di bangku kuliah ke dalam masalah yang sesungguhnya khususnya pengimplementasian pengendalian kas. Serta penulis dapat merasakan situasi dan kondisi kerja yang susungguhnya dan menambah pengalaman kerja guna meningkatkan keterampilan dan menjalankan silahtrahmi dan kerjasama antar anggota perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Hasil Laporan Magang ini diharapkan dapat membantu dan digunakan sebagai pertimbangan pemimpin dalam upaya pelaksanaan sistem pengendalian kas yang ada di Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.



3. Bagi Pembaca

Dapat memberikan beberapa manfaat, seperti tambahan pengetahuan, wawasan dan informasi serta sebagai referensi bacaan dalam pembuatan tugas akhir dimasa yang akan datang.

1.5 Tempat dan Waktu Magang

Praktek Kerja Lapangan ini dilaksanakan selama 40 (Empat Puluh) hari kerja, dimulai dari tanggal 11 Januari 2021 yang hari kerjanya yaitu dari hari senin s/d jumat, yang bertempat di Biro Bina Mental dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Sistematika Penulisan Laporan

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini akan membahas tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat kegiatan, tempat dan waktu magang, serta sistematika penulisan laporan.

Bab II Landasan Teori

Dalam bab ini mengemukakan tentang berbagai referensi atau tinjauan pustaka yang mendukung kajian yang penulis sampaikan. Secara garis besar berisikan tentang pengertian, tujuan, manfaat dan jenis-jenis penerimaan dan pengeluaran kas.

Bab III Gambaran Umum Instansi

Membahas tentang gambaran umum perusahaan yang terdiri dari sejarah instansi, penjelasan logo instansi, visi dan misi, uraian tugas dan struktur organisasi instansi dan aktivitas instansi yang dilakukan oleh Biro Bina Mental dan Kesra Sekretariat Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Barat.

Bab IV Pembahasan dan Analisis

Pada bab ini membahas data dari informasi hasil penelitian yang diolah, dianalisis, ditafsirkan dan dikaitkan dengan analisis sehingga kita dapat mengetahui data hasil penelitian apakah dapat menjawab permasalahan dan tujuan pembahasan dalam landasan teori yang telah dijelaskan sebelumnya.

Bab V Penutup

Terdapat kesimpulan dan saran dari pelaksanaan magang yang dilakukan penulis yang diharapkan dapat bermanfaat bagi instansi.

